

Polres Buka Pelayanan Malam Minggu

WATES (KR) - Polres Kulonprogo Polda DIY melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membuka pelayanan malam Minggu di Jalan Perwakilan Wates atau depan kantor Pemkab Kulonprogo.

Waka Polres Kulonprogo, Koptol Sudarmawan kepada KR, Selasa (4/8) mengatakan, giat pelayanan malam Minggu meliputi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan laporan aduan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

"Kegiatan ini merupakan terobosan Polres Kulonprogo Polda DIY dalam pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, pembuatan SKCK maupun laporan aduan dari masya-



KR-Istimedia

Pelayanan malam Minggu di Jalan Perwakilan Wates.

rakat. Giat ini akan kita laksanakan rutin setiap malam Minggu di Jalan Perwakilan Wates," kata Koptol Sudarmawan.

Selain melayani masyarakat di loket Polres, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulonprogo dan pelayanan malam Minggu, Polres Kulonprogo Polda DIY sejak 2018 melayani penerbitan SKCK dengan sistem jemput bola (Jebol) bagi lansia, ibu hamil dan difabel.

"Sesuai dengan maklumat pelayanan kami menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan SKCK pada 2019 sebesar 97,8 persen, sedangkan IKM pelayanan SIM sebesar 97,3 persen. Dari Januari-Juli 2020 kita terbitkan SKCK sebanyak 9.130, sedangkan SIM sebanyak 18.922," jelasnya.

(M-4)

Kalurahan Kehabisan Dana Operasional Karantina

WATES (KR) - Pemerintahan kalurahan di Kulonprogo mulai kehabisan dana operasional selter karantina pencegahan penularan Covid-19. Warga pendatang dan perantau pulang kampung diarahkan melakukan karantina mandiri.

Infomasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah Satgas Covid-19 Kalurahan di Kapanewon Kokap dan Pengasih, Selasa (4/8) menyebutkan masing-masing kalurahan menyiapkan selter tetapi mulai kesulitan pembiayaan operasional.

Sebagian selter masih terisi warga pendatang atau perantau dari luar daerah menjalani karantina selama 14 hari. Sebagian kalurahan kehabisan anggaran Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Selter masih disediakan dan terisi warga yang menjalani karantina mandiri. Tidak ada lagi biaya operasional dan suplai logistik makanan dari kalurahan," tutur Kelik Sutanto, Tim Satgas Covid-19 Kalurahan Pengasih.

Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo Joko Sunanto mengakui pemerintahan kalurahan mulai kehabisan 'amunisi' untuk penanganan Covid-19.

Menurutnya, sejak Juni 2020 sebanyak 87 kalurahan sudah menerima pencairan DD tahap kedua yang keseluruhan mencapai sekitar Rp 90 miliar. Sebagian dana untuk melaksanakan program padat karya dan penanganan stunting telah tersedot di awal penanganan Covid-19.

Terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kulonprogo, Y Irianto mengatakan hendak menyampaikan permasalahan yang dihadapi kalurahan pada rapat koordinasi Gugus Tugas Covid-19 kabupaten.

"Saya belum bisa menanggapi terkait selter karantina kalurahan. Dinsos DIY sendiri sejak Juni 2020 lalu sudah menghentikan penyaluran logistik makanan ke selter," ujar Iriyanto.

(Ras)-f

BPK-DIY NILAI KULONPROGO

Masih Kurang Gunakan Aplikasi 'E-Government'

WATES (KR) - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DIY, VM Ambar Wahyuni menegaskan, kendati seluruh Indonesia memiliki perwakilan pemerintahan e-government, Kulonprogo menjadi satu-satunya pemerintahan di DIY yang melakukan pemeriksaan kinerja e-government yang berlangsung selama 15 hari, 3 ÷ 17 Agustus dengan pemeriksaan pendahuluan yang menyesuaikan tim nasional.

"Jadwal menyesuaikan dari pusat, rencananya dilaksanakan September. Setelah selesai pendahuluan, harus digabung dengan pusat untuk menentukan program pemerintah beserta izinnya," kata Ambar usai pertemuan dengan Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo di Ruang Rapat Menoreh, kantor bupati setempat, Senin (3/8).

Peremuan membahas seputar pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2019 dan 2020 Semester 1. Ambar mengungkapkan, secara umum Pemkab Kulonprogo kurang penggunaan aplikasi dibanding pema-pemda lain di DIY. Dengan adanya pemeriksaan, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat

waktu dan akurat.

Sekda Astungkoro mengatakan, proses yang paling sulit adalah integrasi perencanaan dan keuangan. Sampai hari ini perubahan data dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih dilakukan secara manual. Sedangkan sistem yang ada di badan tersebut dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih sendiri-sendiri. Yang satu sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan yang satu, produk lokal sehingga belum terintegrasi dengan baik.

Sedangkan Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo, Sutarmam SSTP menjelaskan, pengembangan Aplikasi e-Government di kabupaten ini untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE oleh Pemkab Kulonprogo. Perkembangan SPBE sendiri masih dalam proses pengintegrasian.

"Dokumen yang ditunjukkan di SPBE secara tertulis sudah tapi belum diakui sebagai dokumen SPBE. Memang itu PR kita, tidak banyak aplikasi tapi terintegrasi. Semuanya terintegrasi tunggal tidak sendiri-sendiri dengan platform berbeda. Sehingga, ke depan harapannya aplikasi tidak selalu banyak tapi bisa mengakses," ungkapnya.

(Rul)-f

Dikaji, Permohonan Kompensasi Pajak Bumi BIY

PENGASIH (KR) - Permohonan kompensasi pembayaran pajak bumi Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) oleh PT Angkasa Pura I sebesar Rp 8,2 miliar dikaji Pemkab Kulonprogo.

"Kami saat ini masih mengkaji landasan peraturan daerah dan dimungkinkan aturan lainnya. Perda PBB berlaku bagi wajib pajak yang ada di Kulonprogo, termasuk PT Angkasa Pura I," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo Eko Wisnu Wardana SE dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Senin (3/8).
Pembayaran pajak bumi

sudah berlaku sejak dibangun. Alasan AP I meminta kompensasi, karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan menurun. "Tentu ini tidak bisa langsung diberikan dispensasi, kami harus berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan seperti DPRD, agar kami tidak disalahkan ketika tidak mencapai target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar Eko Wisnu.

PT API sampai saat ini belum membayar pajak bangunan dengan alasan bangunan belum diserahkan oleh pihak ketiga untuk membangun. PT API menggunakan adendum dalam penolakan pemba-

yan pajak bangunan. "Kami masih pelajari, agar dapat mempertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD sebagai pengawas pelaksanaan anggaran," tandas Eko Wisnu.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo H Ponimin Budi Hartono SE MM meminta BKAD harus serius mengkaji permohonan dispensasi yang diajukan AP I. "Saya tidak berharap kasus Kulonprogo kehilangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat pembebasan lahan untuk pembangunan BIY terulang lagi," ujarnya.

(Wid)-f

PPDP TAK PROFESIONAL

Bawaslu Minta Coklit Ulang

WONOSARI (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul menilai kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak profesional. Hal tersebut diambil dari laporan pengawasan se-Gunungkidul.

Sejumlah hal yang ditemukan diantaranya tidak sesuai nama petugas dengan yang tercantum di SK PPDP. Selain itu juga PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah. "Kinerja PPDP tidak profesional, banyak hal yang ditemukan di lapangan," kata anggota

Bawaslu Gunungkidul Rosita, Selasa (4/8).

Diungkapkan, temuan lain yakni ada salah satu TPS di panggung melakukan coklit menggunakan metode pengumpulan pemilih di salah satu rumah warga. PPDP juga tidak melakukan coklit namun hanya menempel stiker di rumah warga. Kejadian

lain PPDP tidak membubuhkan tanda tangan penghuni rumah yang seharusnya di tanda tangan. Baik itu AA2 KWK (stiker) dan AA1 KWK tanda bukti pendaftaran pemilih.

"Dalam aturan KPU salah satu tupoksi PPDP adalah mengecek kesesuaian antara e-KTP dan kartu keluarga dengan daftar A KWK. Saat PPDP tidak melakukan hal tersebut maka tujuan untuk mencocokkan dan meneliti dari coklit tidak tercapai," ujarnya.

Rosita menambahkan,

Bawaslu Gunungkidul sudah memberikan perintah kepada pengawas kecamatan untuk memberikan imbauan tertulis dan dilampirkan bukti di lapangan. Untuk disampaikan dari Panwaslu kepada PPK. Harapannya imbauan tersebut agar ditindaklanjuti oleh PPK sehingga melakukan monitoring dan supervisi kepada jajaran dibawahnya meliputi PPS dan PPDP.

"Beberapa kecamatan sudah menindaklanjuti imbauan Panwaslu dengan mencoklit ulang," jelasnya.

(Ded)-f

TERAKHIR 'VERMIN' PERORANGAN

Mulai 8 Agustus KPU Verifikasi Faktual

WONOSARI (KR) - Ratusan petugas sudah beberapa hari ini melakukan verifikasi administrasi (vermin) surat dukungan (surduk) yang diserahkan calon perorangan Anton Supriyadi ST- Suparno SH dan Kelick Agung Nugroho- Yayuk Kristiyawati.

Vermin sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juli lalu dan akan berakhir Selasa (4/8) ini. Pada awal vermin KPU mengerahkan 160 orang, terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 90 orang dan sekitar 70 anggota panitia pemungutan suara (PPS). Mulai hari Senin jumlah verifikasi tinggal petugas KPU dan 36 petugas kecamatan. "Verifikasi faktual (verfak) menghadirkan pendukung mulai Sabtu (8/8) sampai dengan Minggu (16/8) yang

akan datang," kata koordinator petugas vermin KPU Gunungkidul Gunantoro SIP, Selasa (4/8).

Untuk pemenuhan syarat dukungan setelah verifikasi faktual (verfak) tahap I, bapaslun Anton Suparno menyerahkan surat dukungan sebanyak 38.627 surduk dan paslon Kelick- Yayuk menyerahkan 50.472 surduk. Vermin sudah hampir selesai kemudian akan diplenokan oleh KPU. Setelah itu akan dilanjutkan verifikasi faktual dengan menghadirkan para pendukung di masing-masing kantor Kalurahan. "Setelah itu akan dikumpulkan untuk disimpulkan untuk memenuhi persyaratan untuk pilkada atau tidak," tambahnya.

Jika pasangan perorangan sudah memasuki



KR-Endar Widodo

Verifikasi administrasi di Kantor KPU Gunungkidul

verifikasi administrasi dan vaktual tahap II, sementara bapaslun dari partai politik belum dapat diketahui akan muncul berapa pasangan calon. Baru, bapaslun Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi (Babe) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Sutrisno Wibowo-Ardi yang diusung PAN, PKS dan Demokrat yang sudah mengantongi SK DPP masing-

masing partai pengusung. Sementara Mayor Sunaryanto yang informasinya akan diusung Partai Golkar dan PKB belum ada informasi SK DPP turun.

Sementara Partai NasDem walaupun belum mengeluarkan SK DPP, informasinya hampir dapat dipastikan mengusung Immawan Wahyudi-Suharno. "Jika analisa ini jadi kenyataan akan ada 4 pasang calon dari partai politik," ujarnya.

(Ewi)-f

UNTUK PENANGANAN COVID-19

Pemkab Cairkan Belanja Tak Terduga Rp 44 Miliar

WONOSARI (KR) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan refocusing anggaran dan sampai saat ini telah mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 44 miliar dari APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 yang kini semakin meluas. Dari anggaran dana BTT tersebut, saat ini, sudah ada OPD yang mengusulkan penambahan anggaran. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, perencanaan awal ada sebesar Rp 47 miliar yang dananya melekat di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, BPBD Gunungkidul, dan RSUD Saptosari," katanya, Selasa (4/8).

Utuk Dinas Kesehatan jumlah pagu dari Rp 12 miliar lebih

berubah menjadi Rp 16,1 miliar. Kemudian untuk BPBD Gunungkidul Rp 2,8 miliar dan telah digunakan secara keseluruhan. Dari anggaran sebesar Rp 52,6 miliar itu telah dicairkan sebesar Rp 44 miliar atau mencapai 83,6 persen. Kendati demikian, pemerintah masih memiliki cadangan anggaran. Mengingat sejak awal dilakukan penanganan dan penanggulangan Covid -19 total anggaran yang dilakukan refocusing mencapai Rp 210 miliar. "Dengan demikian, jika sewaktu-waktu ada anggaran yang sangat mendesak masih dapat memanfaatkan BTT," imuhnya.

Sementara untuk BPBD sendiri ini juga mulai mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan dan penanggulangan Covid -19. Pasalnya di BPBD ada beberapa sektor yang diampu, sebagai contohnya penyiapan fasilitas untuk uji

coba di wisata. Anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang melekat pada BPBD.

Sementara itu, anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Eko Rustanto SE mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan berkaitan dengan penggunaan anggaran penanganan Covid -19 di Gunungkidul. Berdasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan BTT sudah hampir mencapai Rp 50 miliar yang telah digunakan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Mulai dari penanganan di bidang kesehatan, pengadaan masker, APD, hingga jaring pengaman sosial yang telah dilakukan pemerintah. "Pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik, hanya saja memang ada beberapa yang masih dikritisi DPRD," terangnya.

(Bmp)-f

Plester Yogya Distribusikan Hewan Kurban

WONOSARI (KR) - Komunitas Kepemudaan Plester Yogyakarta telah menyalurkan hewan kurban berupa 5 ekor kambing. Kegiatan ini merupakan hasil sumbangan dan partisipasi seluruh anggota Plester Yogyakarta di seluruh DIY.

"Momentum ini wujud saling peduli serta merefleksikan tindakan individual maupun kolektif. Harapannya pandemi Covid-19 bisa selesai dan kembali dalam kehidupan yang normal," kata Ketua Umum Plester Ganda Hewan, Minggu (2/7) lalu.

Hewan kurban didistribusikan ke jemaah di Masjid Al-Ikhlash Serut, Gedangsari, Masjid Al Amin Ngasem, Tepus dan Masjid Al Fath Singkil, Tepus. Serta Masjid Fathul Mustaqim Klumpit, Tepus, Masjid Mujahid Gasing, Tepus Purwodadi Dusun Tepus Gunungkidul. Kegiatan ini merupakan kontribusi dari Plester Girl, Plester Youngter, Plester Kota, Plester Mendem Sholawat, Plester Bantul Kota, Plester 99, Plester Zona Timur, Plester Kota Gede, Plester Zona Utara Sle-

man, Plester 351 Zona Selatan, Plester Indrayanti, Plester Wonosari, Plester Kulonprogo dan Plester South Side.

"Plester Yogyakarta sejauh ini juga aktif dalam kegiatan sosial penangan-

an dampak Covid 19 antara lain pembagian masker, penyemprotan, pembagian kebutuhan pokok di Panti Asuhan Binasiwi Jetis, Sedang Sari Bantul, Pajangan dan Yayasan Tuna Netra Tamanan Bantul.

(Ded)-f



KR-Dedy EW

Penyerahan hewan kurban di Gunungkidul.

"MULIA"
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19

➤ GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL. MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

➤ PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
SENIN S/D MINGGU

➤ JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL	04/Aug/20	
CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	14.600	14.850
EURO	17.225	17.475
AUD	10.425	10.625
GBP	19.100	19.600
CHF	15.850	16.200
SGD	10.575	10.875
JPY	137,00	142,50
MYR	3.350	3.550
SAR	3.600	3.950
YUAN	2.050	2.175

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing